

**KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN
GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**Latifah Silvilianti
NPM. 2116041052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN
GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

LATIFAH SILVILANTI

Skripsi

**Sebagai syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

LATIFAH SILVILANTI

Permasalahan gelandangan pengemis masih menjadi isu sosial yang kompleks, meskipun telah diterapkan program oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis proses koordinasi dan mengidentifikasi faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada koordinasi antara Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Koordinasi mengacu pada lima dimensi utama yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan (Handayani dalam Noviana 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga telah terjalin, namun belum berjalan optimal karena dimensi utama dalam koordinasi belum diterapkan secara efektif oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan Lembaga Kesejahteraan sosial. Keterbatasan kompetensi partisipan, minimnya komunikasi aktif, lemahnya kesepahaman peran, dan belum adanya sistem monitoring yang terpadu. Faktor penghambat yaitu belum adanya regulasi teknis yang mengikat antar instansi secara formal. Diperlukan penguatan sinergi antar aktor serta perumusan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan agar penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Koordinasi, Gelandangan Pengemis, Penanggulangan, Dinas Sosial.

ABSTRACT

COORDINATION IN THE MITIGATION OF HOMELESSNESS AND BEGGING IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

LATIFAH SILVILANTI

The issue of beggars and homeless people remains a complex social problem, despite the implementation of programs by the Social Service of Bandar Lampung City. This study aims to analyze the coordination process and identify the inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative approach, focusing on coordination among the Social Service, Civil Service Police Unit (Satpol PP), and Social Welfare Institutions (LKS). Coordination is examined through five main dimensions: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment, as well as continuity of planning (Handyaningrat in Noviana, 2017). The findings show that coordination between institutions has been established but has not run optimally, as the key coordination dimensions have not been fully implemented by the Social Service, Civil Service Police Unit, and Social Welfare Institutions. Limitations in participant competence, lack of active communication, weak role understanding, and the absence of an integrated monitoring system were found. The main inhibiting factor is the lack of formal technical regulations binding the institutions. Strengthening synergy among actors and formulating a more systematic and sustainable coordination mechanism are needed to ensure a more effective approach to addressing the issue of beggars and homeless people in Bandar Lampung City. City.

Keywords: *Coordination, Homelessness, Begging, Mitigation, Social .
Office.*

Judul Skripsi

**: KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN
GELANDANGAN PENGEMIS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Latifah Silviani

Nomor Pokok Mahasiswa

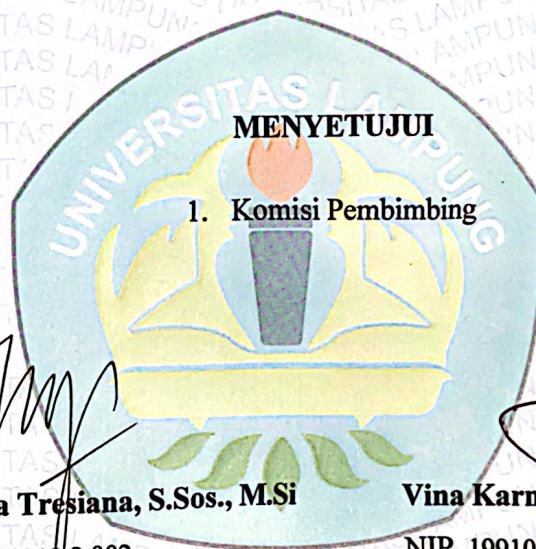
: 2116041052

Program Studi

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si

NIP. 19720918 200212 2 002

Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si

NIP. 19910924 201903 2 019

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara

Dr. Susana Indriyani Caturiani, S.IP., M.Si

NIP. 19700914 200604 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si**

Sekretaris : **Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si**

Penguji Utama : **Dr. Susana Indriyati C, S.IP., M.Si**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **06 Agustus 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Latifah Silvilianti
NPM. 2116041052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Latifah Silvilianti, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 13 Januari 2004, merupakan anak pertama dari Ibu Ranti Herayati dan Bapak Muhtarom. Pendidikan formal yang sudah dilalui penulis berasal dari Taman Kanak-kanak Qur'an (TKQ) Al-Jihad, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Poris Gaga 3, setelah lulus penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 18 Tangerang, namun penulis pindah ke Lampung dan menempuh Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Banjar Baru Tulang Bawang, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Adiluwih Pringsewu. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila, penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) sebagai anggota bidang Sumber Daya Organisasi selama 2 periode kepengurusan, dan sebagai Sekretaris Bidang Sumber Daya Organisasi selama 1 periode kepengurusan, penulis mengikuti kegiatan DPM U KBM Unila, UKM Republika Fakultas. Pada bulan Januari-Februari tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Mas, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian Belajar di Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandar Lampung, dan ditempatkan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

MOTTO

“Never say, “I tried it once and it did not work””

(Ernest Rutherford)

“Allah tidak membebani seseorang,
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah:286)

“Barang siapa bertawakkal kepada Allah,
maka Allah akan cukupkan baginya”

(QS. Ath-Thalaq: 3)

“Hasbunallah Wani'mal waqil nimal maula wani'man nasir”

Cukuplah Allah sebaik-baik penolong kami,
dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong

Gapapa sedih, gapapa nangis, asal besoknya bangkit lagi

(Dari diri sendiri untuk diri sendiri)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segenap rasa syukur dan penuh ketulusan, karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Mama dan Papa Tercinta

Mama dan papa tercinta yang selalu memberi kasih sayang, doa, semangat, dan pengorbanan tiada henti di setiap langkahku. Terimakasih atas cinta yang tulus, kerja keras yang tidak terlihat, dan keikhlasan yang selalu mengiringi perjuanganku hingga di titik ini. Segala pencapaian ini adalah buah dari doa dan restu kalian. Semoga kata sederhana ini menjadi awal dari segala hal yang baik yang bisa kuberikan untuk membalas semua jasa kalian, meski takkan pernah cukup.

Adikku Tersayang

Untuk adikku satu-satunya yang paling kusayangi, kamu adalah penyemangat hidupku, kamu adalah alasan diriku kuat, kamu adalah alasan diriku bertahan hingga saat ini. Tempatku belajar, bertanggung jawab, memberi, menerima, dan mencinta. Semoga keberhasilanku hari ini bisa menjadi pijakan untukmu besok.

Para Dosen dan Civitas Akademik

Terimakasih atas bimbingan, ilmu, dan kesabaran yang tak ternilai. Setiap wejangan dan arahan kalian telah membentuk cara berpikirkku dan membimbing langkahku dalam perjalanan akademik ini.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Koordinasi dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa hasil ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terimakasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zaina, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S. IP., M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, sekaligus dosen pembahas, terimakasih atas bimbingan, ilmu, saran, waktu, dan masukan yang membangun, yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
3. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, kebaikan, dan bimbingannya yang membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
4. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si Selaku dosen pembimbing kedua yang telah sangat banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga akhir
6. Ibu Ita Prihantika, S. Sos., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang selalu mengingatkan dan menyemangati kami untuk tidak lupa mengerjakan skripsi. Terimakasih atas dorongan dan semangatnya.

7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff Administrasi negara terutama Mba Wulan dan Mba Uki, terima kasih untuk selalu membantu mengurus berbagai keperluan administrasi dari awal mahasiswa baru hingga saya lulus, terimakasih sudah menjadi teman ngobrol dan berkeluh kesah selama penulis berkuliah.
9. Seluruh informan penelitian dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Bapak Yulizar, S.H, Ibu Sriwati, S.Pd, Bapak Suheri, S.Sos., M.M, dan kakak-kakak pekerja sosial. Terimakasih sudah membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
10. Informan penelitian dari Satpol PP Kota Bandar Lampung Bapak Carl Arlyn Akbar, S.STP., M.A.P, terimakasih sudah membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
11. Informan penelitian dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri Ibu Siti Habibah, S.Pd, terimakasih sudah membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
12. Terimakasih untuk mamaku, Ibu Ranti Herayati yang selalu mengusahakan segala yang penulis minta, terimakasih karena selalu mendoakan, selalu memberi semangat, selalu memperjuangkan, sedari kecil selalu dituruti apapun kemauan penulis hingga saat ini, maaf karena sempat mengecewakan mama, terimakasih karena mama selalu memaafkan segala kesalahan yang dilakukan oleh penulis, walaupun kita sudah tidak tinggal bersama, terimakasih atas segala cinta yang selalu konsisten, dan doa yang selalu mama panjatkan dalam setiap langkah ku, hiduplah lebih lama dan hiduplah lebih bahagia dengan mengutamakan kebahagiaan mama dibanding kebahagiaan orang lain, walaupun itu keluarga mama sendiri.
13. Terimakasih untuk papaku, Bapak Muhtarom yang selalu menasehati, mengarahkan, membentuk menjadi pribadi yang kuat, mendoakan disetiap langkah, terimakasih atas segala perhatian, dan perjuangan yang papa lakukan untuk kakak dan adik, walaupun akhirnya kita tidak tinggal bersama, tapi terimakasih karena papa selalu memperjuangkan, mengusahakan, dan

melakukan yang terbaik untuk penulis, terimakasih pa, hiduplah lebih lama, hiduplah lebih baik, dan hiduplah lebih bahagia.

14. Terimakasih untuk adikku tersayang, Khalizta Zahra Salsabila, yang saat ini kamu sudah besar, kamu sudah bisa mengutarakan pendapat, terimakasih karena sudah menjadi alasan kakak menjadi lebih kuat, terimakasih karena sudah bertahan bersama-sama, terimakasih sudah menjadi alasan kakak masih bertahan hingga saat ini. Ketika kita hanya berpegangan satu sama lain terimakasih karena kamu tidak meninggalkan kakak, maafkan atas segala kesalahan kakak selama kita bersama, walaupun dimata kakak kamu hanyalah anak kecil yang nakal dan pemberani terimakasih karena itu adalah kenangan yang tidak akan mungkin terulang kembali. Tetaplah bertahan, hiduplah lebih lama.
15. Terimakasih untuk sahabatku Mareta Dwi Citra, yang selalu ceria, selalu di sisi penulis baik senang maupun susah, terimakasih karena sudah menjadi teman senang, sedih, pusing, dan melewati segala situasi bersama, terimakasih karena tidak meninggalkan penulis dalam kondisi apapun, terimakasih karena sudah mengenalkan penulis ke keluargamu ibu, om, juan, terimakasih sudah baik dan selalu memberi canda tawa yang sangat berarti bagi penulis. Terimakasih karena selalu memberikan saran yang membangun, dan menyemangati penulis dalam kondisi apapun, terimakasih semoga kita berteman sampai tua, hingga anak-anak kita berteman, hingga kita bertetangga. Semoga kehidupanmu dan sekeluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
16. Terimakasih untuk sahabatku Elsa Apriyana, yang menjadi tempat curhat pertama ketika penulis sedang senang, sedih, marah. Terimakasih atas canda, tawa, bahagia, sedih, marah, terimakasih karena selalu ada disaat penulis sedang berada di titik yang serendah-rendahnya, terimakasih sudah menguatkan, memberikan solusi yang sangat menenangkan. Maaf jika selama kita berteman banyak kata, perilaku, atau hal lain yang membuat hatimu tersinggung, tergores, marah, namun terimakasih karena sudah menjadi orang yang paling mengerti dan selalu di sisi penulis baik senang maupun susah. Terimakasih karena tidak meninggalkan penulis dalam kondisi apapun.

Terimakasih semoga kita berteman hingga anak-anak kita saling mengen
sama lain.

17. Terimakasih untuk sahabatku Destira Dewi Alti Suci yang selalu ada disaat penulis pusing memikirkan kuliah, skripsi, terimakasih sudah menjadi sahabat dan teman yang sangat baik, terimakasih sudah memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dalam proses awal masuk kuliah hingga mengerjakan skripsi. Terimakasih karena sudah mau berteman dengan penulis di awal perkuliahan, karena kamu jadi mulai ada orang baik lain yang berdatangan dan berteman baik dengan penulis, terimakasih.
18. Terimakasih untuk sahabatku Erya Lukyta Ningtyas yang sangat baik, bahkan bukan hanya dirimu saja yang baik, tetapi umi, om, dan abang serta adik-adikmu sangat baik kepadaku, terimakasih sudah menerima penulis di keluarga yang sangat menjadi keluarga impian penulis. Semoga tercapai segala impianmu, dan semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan, dan dipertemukan juga dengan umi, om, dan keluargamu yang lain.
19. Terimakasih untuk sahabatku Anggi Anggraini yang sangat seru dan selalu membawa aura positif dan ceria, terimakasih atas segala bantuan, dan waktu yang diluangkan untuk main game bersama. Semoga sukses dan semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan dalam keadaan sukses.
20. Terimakasih untuk sahabatku Nike Yuliana yang pada saat menjadi mahasiswa baru kita sangat dekat, namun ada suatu masalah yang membuat kita menjadi jauh, namun saat ini penulis berharap jangan pergi lagi dari hidup penulis.
21. Teman seperjuangan skripsiku, Vania, Nadhila, Kadek, Dhita, Rahel, Ci Fitri, Feby, Putri Della dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih sudah berteman dengan penulis di penghujung perkuliahan, menunggu dosen, hadir ketika sidang, terimakasih sudah membantu, memberi saran yang membangun, dan banyak hal lainnya sudah kalian berikan.
22. Seluruh pengurus Himagara kabinet Adhiyaksa, terutama Putri Azzahra, Made, Yuke, Avisha, Acan, Dea, Dahlia, dan Aywa, terimakasih karena sudah menjadi teman yang baik ketika di kepengurusan, terimakasih karena sudah percaya satu sama lain, ketika tidak ada yang bisa kita percaya lagi, setidaknya kita bisa percaya satu sama lain.

23. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara, terimakasih untuk setiap tawa, canda, kenangan dan kebersamaan baik suka maupun duka.
24. Teman-teman magang Bappeda Ane X Ilpem, Ci Fitri, Ci Bella, Refina, Dinda, Inez, dan Lisel, terimakasih atas segala keluh kesah, senang, sedih, yang kita dapatkan selama magang.
25. Teman-teman Artis 2M, teman KKN ku, teman tidur dan bangunku selama kurang lebih 40 hari, terimakasih untuk Kekei, Ildha, Diva, Jamil, dan Ardi, karena sudah memberikan canda tawa, memberikan warna baru, dan semoga kita akan selalu berteman, dan selalu dipertemukan di lain kesempatan. Serta Bapak dan Ibu Kades Muara Mas, terimakasih karena sudah baik dan selalu sabra menghadapi kami selama KKN.
26. Untuk orang yang berinisial FR terima kasih atas kehadiran, perhatian, serta waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan bantuan yang tak pernah lelah diberikan, yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan, dan semoga karier serta setiap langkahmu ke depan selalu dipenuhi kesuksesan, kelancaran, dan keberkahan dari Allah SWT.
27. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Latifah Silvilianti, terimakasih karena sudah berjuang, sudah bertahan, terimakasih karena sedikit memiliki sifat tidak peduli, yang membuat tidak terlalu memusingkan omongan buruk orang tentang diri ini. Terimakasih selalu bertahan hingga sampai dengan titik ini. Jika suatu suatu nanti, 5, 10, 20, tahun kemudian kamu membaca skripsi ini kembali, dirimu di 21 tahun ingin mengucapkan terimakasih karena sudah bertahan. Jangan lupakan perjuangan selama membuat skripsi ini, jatuh bangun dilalui bersama dengan dirimu sendiri, banyak tekanan dari keluarga, teman, pasangan, tapi tidak apa-apa, karena itulah yang membentuk diri kamu menjadi kuat seperti sekarang.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
.....	iii
DAFTAR TABEL	iii
.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.4 Manfaat penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Konsep Manajemen.....	15
2.3 Koordinasi	16
2.3.1 Definisi Koordinasi	16
2.3.2 Perbandingan Teori Koordinasi dan Kooperasi	17
2.3.3 Teori Koordinasi	18
1. Koordinasi menurut Hasibuan (2006).....	18
2. Koordinasi menurut Handyaningrat.....	20
3. Koordinasi menurut Handoko (2003).....	23
2.4 Definisi Penanggulangan	23
2.5 Definisi Gelandangan Pengemis	25
2.6 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	
3.3 Lokasi Penelitian.....	
3.4 Sumber Data.....	
1. Data Primer	
2. Data Sekunder.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32

1.	Wawancara (<i>Interview</i>).....	32
2.	Dokumen.....	33
3.6	Teknik Analisis Data.....	34
3.7	Teknik Keabsahan Data	36
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Gambaran Umum	39
4.1.1	Kota Bandar Lampung	39
4.1.2	Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	40
4.1.3	Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	41
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	42
4.1.5	Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	44
4.1.6	Strategi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	45
4.2	Hasil Penelitian	45
4.2.1	Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung	48
4.3	Pembahasan Penelitian.....	65
4.3.1	Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung	65
4.3.2	Faktor-faktor Penghambat Koordinasi dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung	93
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1	Kesimpulan	97
5.2	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. program yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS.....	6
2. Data gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.....	8
3. Matriks Penelitian Terdahulu.....	13
4. Data Informan Informasi Penelitian.....	33
5. Gambaran dan Dokumen Penelitian.....	34
6. Jumlah Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung.....	48
7. Hasil dan Pembahasan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka Pikir Penelitian.....	27
2 Komponen dalam analisis data Kualitatif.....	35
3 Bagan Sturktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	42
4 Penjangkauan atau Razia oleh Satpol PP yang diterima oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	61
5 Penjangkauan atau Razia oleh Satpol PP.....	64
6 Alur Koordinasi antarinstansi.....	89

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah melaksanakan program pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek fisik dan mental, dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, yang disampaikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada pidatonya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)*, untuk merealisasikan tujuan ini, sangat penting memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan siap menjalankan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, persiapan SDM harus dimulai sejak dini dengan memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan gelandangan pengemis secara nasional, Bappenas berfokus pada penghapusan kemiskinan, yang menekankan pada penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Bappenas, 2020). Provinsi Lampung menetapkan target yang sejalan dengan target nasional, dengan fokus pada penghapusan kemiskinan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 dengan tingkat kemiskinan 0% (Bappeda Provinsi Lampung, 2023).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1 ayat 30, yang berbunyi “Usaha Penanggulangan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum”. Menurut Rencana Strategis Sekretaris

Daerah Kota Bandar Lampung (2024), Kota Bandar Lampung memiliki enam prioritas khusus dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2025 dengan tema “Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Perkotaan, dan Ekonomi Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Enam prioritas Pembangunan Kota Bandar Lampung yang tertera dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (2024) untuk diwujudkan pada tahun 2025 diantaranya yaitu Meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat, memperbaiki mutu layanan pendidikan, memperkuat infrastruktur yang berkelanjutan guna menunjang pertumbuhan ekonomi serta pelayanan sosial, memperkuat perekonomian daerah dengan prinsip ekonomi kerakyatan, membangun masyarakat yang religius dan berakar pada nilai budaya lokal, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha serta Masyarakat (Renja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024).

Kamrin (2022), menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak sebanding dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai juga menjadi alasan adanya gelandangan dan pengemis. Gelandangan pengemis seringkali kekurangan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, terutama untuk memenuhi makanan yang cukup dan bergizi sehari-hari, tidak jarang untuk bergantung pada makanan sisa atau mengharapkan bantuan dari orang lain, dengan begitu gelandangan pengemis memiliki resiko tinggi terhadap masalah Kesehatan, dari fisik maupun mental. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro, dkk (2019), kemunculan gelandangan dan pengemis, secara berulang seringkali ditemukan pada bulan ramadhan, dan pada perayaan besar lainnya, yang menjadi bukti bahwa mereka mengharapkan belas kasih dari masyarakat untuk memberikan uang atau makanan.

Aktivitas seperti mengemis atau hidup di jalan sering diwariskan sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan sosial-ekonomi yang sulit. Orang tua biasanya mengajarkan anak-anaknya cara bertahan hidup melalui mengemis, karena menganggap hal tersebut sebagai keterampilan daripada sebuah masalah (Hasan, 2019). Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan ini biasanya dianjurkan untuk

menerima kehidupan di jalan sebagai bagian dari identitas mereka, bahkan mereka akan merasa bangga dengan aktivitas tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2023), hal ini sudah menjadi budaya yang dinormalisasikan dalam masyarakat, budaya dan kebiasaan malas yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan pergeseran nilai sosial, khususnya dalam hal etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari daerah urban tetapi tidak mendapatkan pekerjaan cenderung memilih menjadi pengemis yang dijadikan sebagai profesi utama karena adanya jaminan penghasilan harian tanpa memerlukan keterampilan khusus. Sikap malas dan enggan berusaha membuat mereka merasa nyaman dengan pola hidup tersebut secara terus-menerus.

Di sisi lain, masyarakat yang terbiasa melihat keberadaan gelandangan pengemis sering kali menganggap fenomena ini sebagai hal yang normal, ketidakberdayaan atau keengganan untuk menghadapi masalah ini justru memperkuat penerimaan terhadap situasi tersebut (Rizki, dkk 2022). Madureh.com (2023), menemukan kasus yang terjadi di Indonesia dapat ditemukan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Di wilayah tersebut, terdapat sebuah permukiman yang dikenal sebagai "kampung pengemis," di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dengan mengemis. Lingkungan di kampung ini didominasi oleh gang-gang sempit dengan rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan papan. Namun, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagai daya tarik tersendiri, sehingga kampung tersebut berkembang menjadi objek wisata yang menarik perhatian masyarakat dari luar daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, dan gelandangan pengemis. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan perlindungan kepada kelompok-kelompok tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi jumlah mereka di jalanan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menetapkan kebijakan penanggulangan, melalui *Leading Sector* Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,

yaitu dengan proses Rehabilitasi. Rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi individu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam tata kehidupan bermasyarakat (Dinsos Kota Bandar Lampung, 2024).

Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2024), mengklasifikasikan gelandangan dan pengemis menjadi 2 jenis, yaitu gelandangan dan pengemis, dan gelandangan psikotik. Gelandangan pengemis adalah seseorang yang menggelandang dan meminta-minta, dan kebanyakan tidak memiliki tempat tinggal, sedangkan gelandangan psikotik adalah orang yang memiliki gangguan jiwa dan kemudian menggelandang.

Keberadaan gelandangan pengemis mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang berada di wilayah mereka melakukan aksinya. Menurut Yuswalina & Triyandhy (2021), ditemukan bahwa jika dibiarkan terus menerus maka masalah baru yang akan timbul, munculnya perilaku kriminal menjadi salah satu dampak yang dapat terjadi. Gelandangan dan pengemis yang kesulitan mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya berpotensi melakukan tindakan melanggar hukum, seperti pencurian, penjambratan, hingga tindakan kekerasan di area tertentu.

Keberadaan gelandangan dan pengemis yang mencari nafkah di jalanan masih menjadi salah satu permasalahan sosial di Kota Bandar Lampung. Hal ini diperkuat oleh unggahan dari akun Instagram @Lampungfolk pada 17 Januari 2025, yang menunjukkan bahwa praktik ini masih marak terjadi, terutama pada hari Jumat. Hari Jumat sering dimanfaatkan oleh mereka untuk memperoleh bantuan dari masyarakat melalui konsep “Jumat Berkah”, di mana sebagian masyarakat merasa lebih terdorong untuk berbagi atau memberikan sedekah. Kondisi ini mencerminkan dinamika sosial di tengah masyarakat, sekaligus menyoroti tantangan dalam penanganan masalah sosial dan ekonomi di wilayah perkotaan.

Menurut Junita & Ruja (2024), kegiatan menggelandang dan mengemis dapat dianggap sebagai salah satu strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh individu-individu tersebut. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, mereka cenderung terus mencari inovasi baru dalam upaya menarik perhatian masyarakat agar memberikan bantuan, baik dalam bentuk uang maupun makanan, dengan memanfaatkan empati dan rasa iba dari lingkungan sekitarnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, dijelaskan bahwa razia dilakukan oleh petugas Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh tim gabungan yang dibentuk oleh walikota. Kemudian dilakukan tahap pendataan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan cara menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

Usaha rehabilitasi sosial yang dijelaskan didalam Perda No 3 tahun 2010 merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti. Usaha rehabilitasi sosial bagi pengemis usia produktif dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan cara bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, bantuan stimulan peralatan kerja dan/ atau modal usaha, pengembalian dan/ atau pemulangan ke daerah asal yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Sosial dan/ atau Satpol PP.

Berikut disajikan tabel program yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS berdasarkan pada hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis, menjelaskan dalam Bab III pada bagian ketiga usaha penanggulangan, pada pasal 8 dan pasal 9 yang berbunyi “Usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok”.

Tabel 1. program yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS

No.	Stakeholder	Tugas dan Tanggung Jawab	
1.	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	1. Berkoordinasi dengan para stakeholder dalam upaya penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.	
		2. Mengklasifikasikan gelandangan pengemis, yang penduduk asli Kota Bandar Lampung dan luar kota.	
		Luar Kota	Dalam Kota
		a) Program Tali Asih diberlakukan jika ada gelandangan pengemis yang berasal dari luar kota, dan akan diberikan uang bantuan untuk kebutuhan dalam perjalanan.	a) mencari keluarga dekat atau kerabat dekat yang dapat dihubungi, kemudian dikembalikan ke keluarganya masing-masing
		b) Dinas Sosial akan mengajukan surat ke Dinsos Provinsi, yang kemudian Dinsos Provinsi akan memulangkan orang tersebut.	b) jika tidak memiliki keluarga, maka akan diberlakukan perjanjian hitam diatas putih, yang berisi perjanjian jika tertangkap 3 kali, maka akan direhabilitasi di lempasing,

		yang bekerjasama dengan Lembaga Binaan di kecamatannya
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	1) Melakukan penjaringan Razia terhadap gelandangan pengemis di lapangan 2) Memberikan hasil orang yang terkena penjaringan ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
3.	Lembaga Kesejahteraan Sosial	1. Melihat potensi dari gelandangan pengemis yang telah direhabilitasi, mana yang lebih berpotensi untuk mendapatkan bantuan. 2. panti mendapatkan anggaran dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk memberikan bantuan sosial berupa barang untuk modal usaha. 3. Dilakukan pemantauan apakah bantuannya diimplementasikan dengan baik atau sebaliknya.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Tabel diatas menjabarkan mengenai batasan kewenangan yang dilakukan oleh stakeholder terkait yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri, dalam koordinasi penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan larangan bagi gelandangan dan pengemis untuk melakukan aktivitasnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan dan pengemis. Pada Pasal 13 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang atau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilarang mengemis, mengamen, atau menggelandang di tempat umum dan jalanan.” Selain itu, Pasal 13 Ayat 2 melarang individu atau kelompok melakukan kegiatan meminta-minta dengan mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan, serta melarang pengemis yang menggunakan alat bantu di area publik dan jalanan karena dapat membahayakan keselamatan, mengganggu keamanan, dan menghambat pemakaian fasilitas umum.

Berikut disajikan sebuah tabel yang menggambarkan distribusi jumlah akumulasi gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung, yang menunjukkan data hasil penjarangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Data gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.

No	Tahun	Gelandangan & Pengemis
1.	2020	48
2.	2021	963
3.	2022	47
4.	2023	65
5.	2024	127

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025.

Berdasarkan data yang terlampir, persentase jumlah gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung mengalami fluktuasi atau perubahan yang tidak menentu setiap tahunnya. Data diperoleh dari hasil riset peneliti di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 2025. Tahun 2020 berjumlah 48, dan di tahun 2021 mengalami pelonjakan yang sangat serius yaitu 963, dimana pada masa itu dilanda bencana Covid-19 yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya, sehingga membuat banyak orang yang turun kejalan.

Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis, hampir mencapai 100% yaitu di angka 47, Dinas Sosial mengungkapkan bahwa pada masa ini Indonesia sedang menjalani *new normal*, sehingga banyak masyarakat mulai bekerja dari rumah dengan membuka usaha UMKM, yang membuat angka gelandangan pengemis dapat turun secara drastis. Kemudian di tahun 2023 berjumlah 65, dan di tahun 2024 mengalami pelonjakan menjadi berjumlah 127. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2025), mengungkapkan bahwa adanya pelonjakan di tahun 2024 karena pada masa ini mengalami kesulitan ekonomi, lebih banyak masyarakat memilih untuk berdagang, sehingga skala produsen lebih besar dari konsumen, serta kenaikan harga barang dan upah yang tidak sebanding menjadi salah satu faktor penyebab.

Berdasarkan pernyataan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (2025), fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung masih berlangsung meskipun sudah diterapkan berbagai kebijakan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa salah satu faktor utama kegagalan kebijakan tersebut adalah karena posisi strategis Kota Bandar Lampung sebagai kota transit bagi para pelancong yang melakukan perjalanan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Banyak dari para pendatang ini menghadapi kesulitan ekonomi selama perjalanan, sehingga mereka terpaksa mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Dinas Sosial mengungkapkan bahwa mayoritas gelandangan pengemis bukan merupakan penduduk asli Kota Bandar Lampung, melainkan berasal dari daerah lain. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang ada menjadi kurang efektif, karena program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang diterapkan di tingkat lokal tidak dapat sepenuhnya mengatasi persoalan yang bersumber dari faktor eksternal. Akibatnya, meskipun upaya penertiban dan rehabilitasi terus dilakukan, gelombang baru gepeng terus bermunculan dari luar daerah, sehingga permasalahan ini sulit diatasi secara tuntas, (Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2025).

Fenomena tersebut dapat terjadi karena dalam proses implementasi, penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat rutin, terbatas pada pelaksanaan tugas-tugas pokok tanpa adanya upaya inovatif yang mampu menghasilkan perubahan signifikan terhadap kondisi mereka. Pendekatan yang terus-menerus mengandalkan pola operasional seperti biasa cenderung mempertahankan keadaan yang ada dan tidak membuka ruang bagi alternatif solusi yang lebih efektif. Kurangnya inovasi dalam strategi penanganan tersebut berimplikasi pada terbatasnya kemampuan pemerintah atau pihak terkait dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.

Pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin cenderung kurang tanggap terhadap dinamika perubahan yang terjadi, baik di kalangan gelandangan pengemis maupun dalam lingkungan sosial tempat mereka berada. Akibatnya, kebutuhan spesifik serta potensi individual gelandangan pengemis berisiko tidak tertangani secara optimal, sementara program-program yang dilaksanakan berpotensi kehilangan relevansinya seiring dengan perkembangan sosial dan lingkungan yang terus berlangsung. Ketiadaan inovasi dalam pendekatan penanggulangan dapat menghambat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mengurangi kemungkinan terciptanya program yang lebih adaptif, dan melewatkan peluang untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.

Permasalahan mendasar yang muncul yaitu belum adanya pola koordinasi yang terintegrasi dan konsisten antar pemangku kepentingan. Tumpang tindih peran, lemahnya komunikasi, serta perbedaan pendekatan antara instansi pemerintah dan mitra non-pemerintah menyebabkan penanggulangan gepeng tidak berjalan sinergis. Selain itu, kurangnya sistem pemantauan bersama dan keterlibatan masyarakat yang rendah juga memperburuk kondisi ini.

Dalam kajian administrasi negara, teori koordinasi dipahami sebagai mekanisme klasik dalam tata kelola pemerintahan yang berfungsi untuk menyelaraskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar instansi atau unit birokrasi, koordinasi menjadi krusial dalam sistem pemerintahan yang kompleks dan hierarkis, seperti di Indonesia, di mana fungsi-fungsi pemerintahan tersebar pada berbagai tingkat (pusat dan daerah) dan antar sektor (horizontal) (Hegmann, 2023). Melalui koordinasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan publik dapat dijalankan secara efisien dan tidak tumpang tindih. Secara teoretis, koordinasi berkaitan erat dengan pendekatan manajerial birokratik yang menekankan efisiensi, kepatuhan pada prosedur, dan struktur formal. Dalam praktiknya, misalnya, pelaksanaan program nasional seperti penanggulangan kemiskinan mengharuskan adanya koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar implementasinya berjalan sesuai rencana (Sridianti, 2024).

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis, yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi telah dilakukan, faktor apa saja yang menjadi penghambat. Dari uraian tersebut, didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam proses koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dibentuk adalah:

1. Mengetahui proses koordinasi diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menanggulangi masalah gelandangan, pengemis di Kota Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam proses koordinasi penanggulangan gelandangan pengemis.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam ranah ilmu sosial sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dari pihak-pihak yang bekerja sama dan berkaitan dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti dan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan penelitian ini. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasannya yang mengkaji tentang Koordinasi dalam menanggulangi sosial di Kota/Kabupaten di Indonesia.

Tabel 3. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Koordinasi Pemerintahan Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis di Kota Pekanbaru (2021). Hadi, A. R.	Koordinasi menurut Hasibuan dalam Rahmeina (2013) yang terdiri dari 4 faktor, yaitu 1. Kerjasama 2. Komunikasi, 3. Pembagian kerja 4. Disiplin.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai koordinasi pemerintah antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Umum dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini bahwa koordinasi tidak berjalan dengan baik, menurut indikator koordinasi hasibuan, kerjasama sudah dilakukan sesuai perda tetapi pada kenyataannya koordinasi belum berjalan secara efektif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis. hasil dari penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat oknum Satpol PP dan Dinas Sosial yang tidak menjalankan tugasnya ketika di lapangan
2	Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Gelandangan dan	Koordinasi menurut Hasibuan (2011) yang diantaranya yaitu	Penelitian ini mengkaji tentang koordinasi pemerintah dalam penanggulangan gelandangan pengemis di kota pekanbaru

Pengemis di Kota Pekanbaru, (2024). Anita, A., & Nurmasari, N.	1. Kerjasama 2. Komunikasi 3. Pembagian kerja 4. Disiplin.	dengan menggunakan teori Hasibuan (2011), dalam pelaksanaan penanggulangan yang dilakukan oleh Satpol PP, dan Dinas Sosial, belum sepenuhnya optimal, dikarenakan ditemukan Sebagian gelandang pengemis yang tidak mendapatkan rehabilitasi, gepeng tersebut hanya ditempatkan di halte bus, atau ditempat umum lain yang digunakan untuk tempat tunggu. Serta tidak ada proses rehabilitasi, hanya berhenti pada tahap diberikan nasihat dan surat perjanjian kemudian dipulangkan.
3 Analisis Koordinasi Pemerintah Kota Tegal Dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (2025). Helsandi, F.A., & Marlina, N.	Koordinasi menurut White, terdapat 4 faktor yaitu 1. Komunikasi 2. Pembagian tugas 3. Kepemimpinan 4. Pengawasan	Penelitian ini mengkaji tentang koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal dalam pelaksanaan penertiban dan penanganan permasalahan PGOT. Dalam pelaksanaannya koordinasi dapat dikatakan belum terpenuhi secara optimal. Koordinasi berjalan fungsional namun belum sistemik, tidak ditunjang SOP yang terintegrasi, belum menggunakan sistem pelaporan digital, dan belum memiliki mekanisme evaluasi lintas instansi yang berkelanjutan.

Sumber: Diolah oleh peneliti dari Skripsi dan Jurnal, 2025.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian diatas, lebih banyak penelitian dengan menggunakan teori Hasibuan, dengan indikator Kerjasama, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Maka peneliti menggunakan sudut pandang dari teori yang berbeda yaitu menggunakan teori Handayaniingrat dengan indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif, serta kontinuitas perencanaan, teori Handayaniingrat digunakan untuk menganalisis koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.

2.2 Konsep Manajemen

Istilah manajemen telah menjadi konsep yang esensial dalam kehidupan modern, dimana hampir seluruh bidang pekerjaan dan struktur organisasi tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip-prinsip manajerial. Manajemen berperan sebagai inti dari berbagai aktivitas organisasi, karena menjadi landasan dalam mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Definisi Manajemen dalam tataran praktis *management is getting things done through other people*. Definisi ini menekankan kerja tim, delegasi, dan hasil, definisi ini memiliki dua makna, yaitu “*getting things done with other people*” atau mencapai sesuatu “bekerja bersama” orang lain, dan “*getting things done through other people*” atau mencapai sesuatu “bekerja melalui” orang lain. Untuk mencapai tujuan, tentu akan lebih efektif dan lebih efisien jika manajer bekerja-bersama-sama dengan karyawan daripada bekerja melalui karyawan.

Definisi manajemen dalam tataran teoritis dikategorikan atas dua kelompok. Ada sekelompok pendefinisi manajemen yang menekankan manajemen sebagai kegiatan optimasi, integrasi dan koordinasi sumber-sumber dan tugas-tugas agar tujuan organisasional tercapai secara efisien dan secara efektif. Kelompok kedua menekankan manajemen sebagai proses dari fungsi-fungsi agar efektif melaksanakan tugas-tugas dan efisien menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasional.

Henry Fayol (dalam Judijanto et al., 2024) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, serta pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu, manajemen juga dipahami sebagai seni dalam mengatur individu maupun pekerjaan yang dilakukan. Pandangan lain menyebutkan bahwa manajemen melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia serta sumber daya lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fajarani et al., 2021).

2.3 Koordinasi

2.3.1 Definisi Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses menyeluruh yang bertujuan untuk menyelaraskan dan menyinkronkan berbagai tindakan serta usaha dari individu, tim, maupun unit dalam sebuah organisasi (Wardhana, 2024). Sebagai salah satu fungsi manajemen, koordinasi tidak dapat terpisahkan dengan fungsi manajemen lainnya. Dalam menghubungkan fungsi-fungsi manajemen membuat fungsi koordinasi sebagai fungsi manajemen yang paling penting untuk menjadikan organisasi menjadi semakin baik serta menghindari resiko-resiko yang dapat mengancam organisasi (Martius, 2022)

Menurut O'Toole dan Meier (2004), koordinasi dalam sektor publik adalah proses aktif yang dilakukan oleh manajer publik untuk menyatukan berbagai aktivitas antar lembaga agar dapat mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Koordinasi bukan hanya soal struktur, tetapi bagaimana pemimpin mengelola ketergantungan lintas aktor dan fungsi dalam sistem pemerintahan yang kompleks. Koordinasi dalam sektor publik tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang sederhana dalam konteks politik dan administrasi. Kompleksitasnya sering kali menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam membangun kerja sama yang efektif antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah (Bouckaer dkk, 2010).

Koordinasi eksternal merupakan suatu bentuk hubungan kerja sama yang terjalin antara suatu organisasi atau instansi dengan pihak-pihak di luar struktur internalnya, baik itu instansi pemerintah lainnya, lembaga swasta, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat umum. Tujuan utama dari koordinasi eksternal adalah untuk menyinergikan peran, wewenang, serta sumber daya dari berbagai pihak agar tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang bersifat lintas sektor.

Koordinasi ini menjadi penting ketika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan keterlibatan dan kontribusi dari pihak lain secara terstruktur dan sistematis. Dalam praktiknya, koordinasi eksternal melibatkan proses komunikasi, negosiasi, serta penyusunan kesepakatan bersama, seperti nota kesepahaman (MoU) atau rencana aksi terpadu, untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Tingkat keberhasilan koordinasi eksternal sangat bergantung pada kesamaan persepsi, komitmen antar pemangku kepentingan, serta keberadaan mekanisme formal yang dapat mendukung kerja sama yang berkelanjutan.

Proses koordinasi antar instansi berpusat pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yang menitikberatkan antar instansi berkoordinasi dengan Dinas Sosial, seperti Satpol PP yang sebelum melakukan penertiban, pihak satpol pp berkoordinasi dengan dinas sosial. Begitupun dalam proses rehabilitasi, pihak LSM berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam melakukan kegiatannya, anggaran yang didapatpun diperoleh dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Menurut Sakdiah (2021), proses koordinasi memungkinkan terciptanya aturan dan warisan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah maupun pihak nonpemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan memiliki visi serta tujuan sejalan dalam menangani isu tertentu. Dengan adanya kerja sama yang terstruktur, masalah dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif.

2.3.2 Perbandingan Teori Koordinasi dan Kooperasi

Koordinasi menekankan pada struktur formal, dengan pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang terstruktur. Setiap individu atau kelompok bekerja secara mandiri tetapi disinkronkan dengan pihak lain

untuk mencapai hasil yang lebih besar. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih, konflik, atau gangguan dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, dalam sebuah organisasi pemerintah, koordinasi antar lembaga sangat penting agar kebijakan publik dapat dijalankan secara efisien dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (Hasibuan, 2007).

Sedangkan koperasi menekankan pada bentuk kerja sama yang bersifat sukarela dan informal, di mana individu atau organisasi secara sadar berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi menekankan aspek kebersamaan, saling pengertian, dan kepercayaan, tanpa harus selalu terikat oleh struktur formal. Hubungan antar pihak dalam koperasi tingkatannya sederajat, hanya berdasarkan emosional dan rasa saling percaya

2.3.3 Teori Koordinasi

Terdapat beberapa ahli yang mengungkapkan model Koordinasi yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi menurut Hasibuan (2006)

Hasibuan (2006), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi. Dalam konteks penanggulangan gempa di Kota Bandar Lampung, model ini relevan karena melibatkan Dinas Sosial, Satpol PP, LSM, dan masyarakat, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tantangan koordinasi, distribusi peran, serta keterbatasan sumber daya. Teori ini juga merupakan hasil adopsi dari beberapa pandangan para ahli, yang memberikan perspektif menyeluruh tentang bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi terhadap koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi atau antarinstansi, yaitu:

1) Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan mengacu pada tanggung jawab pemimpin dalam menciptakan koordinasi yang efektif, yaitu dengan menyusun jadwal dan aktivitas setiap individu secara teratur agar tercapai keselarasan dalam pencapaian tujuan. Ketika kesatuan tindakan ini berjalan dengan baik dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menjadi inti dari proses koordinasi. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dari seluruh anggota organisasi agar mampu menyesuaikan diri serta menjalankan tugasnya masing-masing secara terpadu, sehingga tidak bekerja secara terpisah atau individual.

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia. Kata ini berasal dari bahasa Latin "*communication*", yang berarti berbagi atau menyampaikan informasi. Dalam konteks organisasi, komunikasi memiliki peran yang sangat vital karena menjadi sarana bagi pemimpin untuk menyampaikan arahan maupun informasi kepada para anggotanya. Dalam proses koordinasi, komunikasi tidak dapat dipisahkan, sebab sebagian besar mekanisme koordinasi dalam organisasi berlangsung dan terbentuk melalui interaksi komunikasi.

3) Pembagian Kerja

Prinsip pembagian kerja dalam organisasi merujuk pada proses distribusi tanggung jawab dan uraian tugas kepada setiap individu, dengan tujuan agar masing-masing personel menjalankan fungsi yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dalam perspektif teoritis, pencapaian tujuan organisasi bersifat kolektif dan tidak mungkin direalisasikan secara

individual. Kolaborasi antara dua atau lebih unit kerja yang dikoordinasikan dengan baik cenderung menghasilkan kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan kerja secara terpisah. Oleh karena itu, pembagian kerja menjadi salah satu fondasi utama dalam struktur organisasi. Penerapan prinsip ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran organisasi secara menyeluruh.

4) Disiplin

Disiplin dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa setiap tanggung jawab terselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

2. Koordinasi menurut Handyaningrat

Indikator koordinasi menurut Handyaningrat dalam Noviana (2017), menekankan bahwa koordinasi dapat diukur melalui lima indikator:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam koordinasi yang efektif. Dalam konteks ini, komunikasi mencakup keberadaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Informasi yang dibagikan harus mencakup data tentang lokasi gelandangan pengemis, jumlah, kondisi, dan kebutuhan mereka, alur informasi merujuk pada bagaimana informasi tersebut disebarluaskan di antara para pihak yang terlibat.

Pola komunikasi yang terjalin secara formal maupun informal harus tetap memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan baik pihak internal maupun pihak eksternal demi menghindari miskomunikasi, dan mempercepat proses koordinasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi melalui media informal, misalnya menggunakan sistem manajemen informasi berbasis web untuk berbagi data *real-time* tentang penanggulangan gelandangan pengemis dapat mempercepat respons dan memastikan semua pihak terlibat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat.

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran tentang pentingnya koordinasi menentukan bagaimana setiap pihak memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam upaya bersama. Ini mencakup tingkat pengetahuan pelaksana yang menunjukkan sejauh mana individu yang terlibat dalam penanggulangan gelandangan pengemis memahami pentingnya koordinasi dan bagaimana melakukannya secara efektif. Pengetahuan ini melibatkan pemahaman terhadap prosedur, tujuan, dan manfaat koordinasi. Serta tingkat keselarasan antara tujuan, strategi, dan tindakan dari berbagai pihak yang terlibat. Ini memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

3) Kompetensi Partisipan

Kompetensi dari individu yang terlibat dalam proses koordinasi sangat mempengaruhi efektivitasnya. Kompetensi ini mencakup Pejabat yang berwenang perlu terlibat dalam proses koordinasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil

memiliki dukungan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan. Kemudian ada tidaknya kehadiran ahli dalam bidang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang relevan, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi.

4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Faktor ini mencakup bagaimana komitmen, kesepakatan, dan insentif mempengaruhi koordinasi, adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat mengenai tujuan, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diambil. Kesepakatan ini memastikan bahwa semua pihak berada pada halaman yang sama. Implementasi dari kegiatan yang disepakati merupakan indikasi bahwa koordinasi berjalan dengan baik. Ini melibatkan tindakan konkrit yang diambil berdasarkan rencana yang telah dibuat. Keberadaan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban mereka dapat meningkatkan komitmen dan disiplin dalam koordinasi. Insentif dapat memotivasi partisipasi aktif dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat. Insentif bisa berupa penghargaan atau keuntungan lain yang didapat ketika tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi dipenuhi dengan baik.

5) Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas dalam perencanaan menunjukkan bahwa koordinasi bukanlah aktivitas satu kali, tetapi proses berkelanjutan. Memberikan dan menerima umpan balik secara berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas koordinasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Umpan balik dari lapangan, baik dari masyarakat maupun gelandangan pengemis sendiri, sangat penting dalam menilai keberhasilan upaya penanganan. Kemampuan untuk melakukan perubahan

terhadap kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan umpan balik dan evaluasi terus-menerus memastikan bahwa koordinasi tetap relevan dan responsif terhadap kondisi dan kebutuhan yang berubah.

3. Koordinasi menurut Handoko (2003)

Menurut Handoko, koordinasi yang efektif dalam organisasi memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Koordinasi berperan dalam mengurangi potensi munculnya rasa keterasingan atau terpisah antara unit-unit organisasi maupun antar pejabat di dalam struktur organisasi.
2. Koordinasi turut mencegah timbulnya anggapan bahwa salah satu unit kerja atau pejabat memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan yang lain.
3. Melalui koordinasi yang efektif, risiko terjadinya konflik antar bagian dalam organisasi dapat diminimalisir.
4. Koordinasi juga berfungsi untuk menghindari terjadinya kekosongan atau kelalaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan organisasi.
5. Dengan adanya koordinasi, tingkat kesadaran pegawai untuk saling mendukung dan bekerja sama akan meningkat.

2.4 Definisi Penanggulangan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010, tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1 ayat 30, yang berbunyi “Usaha Penanggulangan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisasi dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya gelandangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum”.

Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terkoordinasi untuk mengatasi, mengurangi, atau

memulihkan dampak dari suatu permasalahan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan menyediakan program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang rentan, sedangkan intervensi mencakup kegiatan penjangkauan dan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, rehabilitasi dapat meliputi penyediaan hunian sementara, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial. Selain itu, peningkatan kesadaran bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap gelandangan pengemis serta mendorong keterlibatan mereka dalam solusi jangka panjang (Khalisa, 2023).

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, dengan pendekatan yang mencakup pencegahan (*preventif*), mitigasi (pengurangan risiko), respon langsung, dan pemulihan. Penanggulangan suatu permasalahan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkesinambungan untuk menciptakan solusi yang efektif. Komponen pertama adalah identifikasi masalah, yang merupakan langkah awal dalam memahami permasalahan secara menyeluruh. Pada tahap ini, upaya diarahkan untuk menggali informasi, menganalisis akar penyebab, serta memetakan dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Identifikasi masalah menjadi dasar bagi perencanaan strategi yang tepat sasaran.

Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah pencegahan atau pendekatan preventif. Komponen ini bertujuan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan di masa depan atau mengurangi kemungkinan masalah serupa terulang. Dalam pencegahan, langkah-langkah proaktif seperti edukasi, peningkatan kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat sering kali diutamakan. Selanjutnya, jika permasalahan telah terjadi, penanganan atau pendekatan kuratif menjadi fokus utama. Pada tahap ini, tindakan konkret dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang berlangsung. Langkah-langkah kuratif biasanya melibatkan pemberian bantuan langsung, penyelesaian konflik, atau penanganan krisis secara langsung untuk meminimalkan dampak yang lebih luas.

2.5 Definisi Gelandangan Pengemis

Menurut Setiawan (2020), gelandangan dan pengemis merupakan representasi dari kelompok masyarakat yang sangat rentan secara ekonomi karena berada dalam kondisi sub marginal. Perda No. 3 Tahun 2010 mendefinisikan gelandangan pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/ atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan atau di tempat umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Gelandangan merujuk pada individu yang hidup berpindah-pindah tanpa memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka umumnya menetap di berbagai lokasi seperti bawah jembatan, taman, atau area publik lainnya. Kehidupan para gelandangan bergantung pada ruang-ruang terbuka untuk bermalam, karena tidak memiliki hunian permanen. Kehidupan mereka umumnya tidak stabil, penuh tantangan, dan sering bergantung pada bantuan dari masyarakat atau organisasi sosial (Yudianto & Apriliansah, 2023). Pengemis adalah orang yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meminta-minta serta berharap dikasihani oleh orang lain, baik di jalanan, pasar, tempat ibadah, atau tempat umum lainnya. Secara umum kondisi fisik dari pengemis kebanyakan yang sudah tua renta atau yang memiliki kebutuhan khusus seperti tuna netra, cacat atau lumpuh tangan dan kaki, jompo, bahkan ada yang masih memiliki fisik sempurna.

Gelandangan dan pengemis diklasifikasikan menjadi satu kategori karena mereka memiliki karakteristik dan kondisi sosial yang serupa, serta menghadapi masalah yang sama dalam Masyarakat. Gelandangan memungkinkan mencari nafkah dengan cara mengemis, namun tidak semua gelandangan mencari nafkah dengan cara mengemis. Demikian pula dengan pengemis, beberapa di antaranya mungkin memiliki tempat tinggal, sementara terdapat beberapa yang lain hidup tanpa memiliki tempat tinggal tetap.

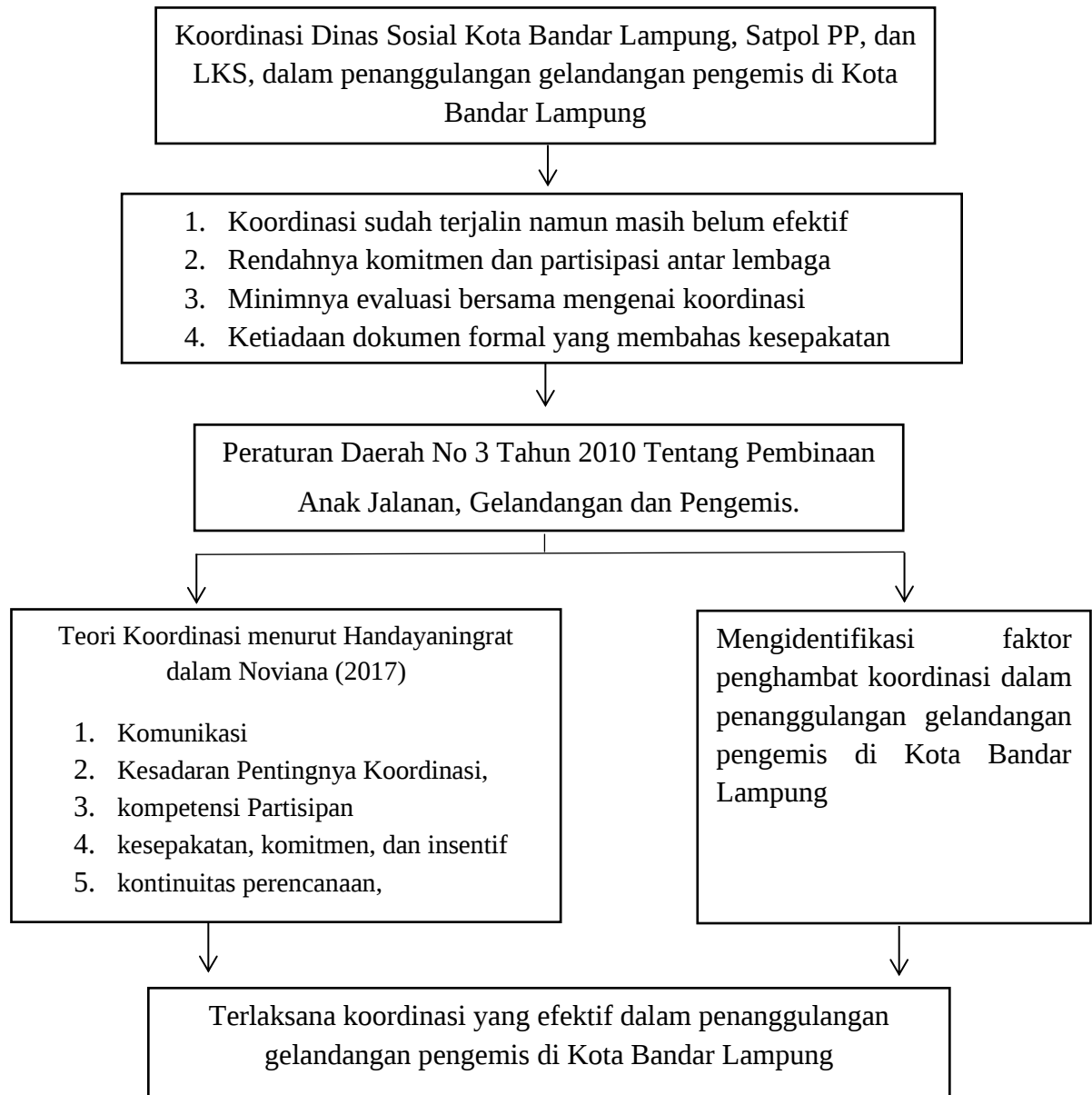
Kegiatan yang digeluti oleh gelandangan selain mengemis yaitu menjadi pengamen, pemulug, mengais sisa makanan, bahkan jika dibiarkan kriminalitas menjadi salah satu kegiatan yang akan dilakukan.

2.6 Kerangka Pikir

Gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung menjadi tugas bagi Dinas Sosial, karena setiap tahunnya selalu mendapatkan grafik yang tidak pasti, dengan begitu mempertanyakan bagaimana koordinasi yang diterapkan dalam penanggulangan gelandangan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Kontribusi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung harus memenuhi tujuan utama pada *SDGs* yaitu tanpa kemiskinan, mengurangi ketimpangan, memberikan kesejahteraan yang baik seperti Kesehatan, kesejahteraan, Pendidikan.

Dinas Sosial menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 mengenai Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Dinas sosial melibatkan aspek kebijakan, anggaran, serta Kerjasama dengan Lembaga sosial dan Masyarakat, strategi yang diterapkan yaitu program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, pengawasan dan penegakan hukum.

Masalah gelandangan pengemis masih menjadi perhatian serius karena jumlah mereka yang masih tinggi. Upaya koordinasi telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, namun hasilnya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya efektivitas dalam menekan keberadaan gelandangan pengemis meskipun telah ada upaya. Hal ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan Masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti, tahun 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung. Dalam konteks koordinasinya. Penelitian ini menganalisis koordinasi antara pemerintah daerah Dinas Sosial, Satpol PP, LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), dalam mengatasi persoalan ini.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam koordinasi, seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan keberlanjutan rehabilitasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan strategis dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung (Wijaya, 2020).

3.2 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, penting untuk menetapkan fokus dalam penelitian kualitatif. Sugiyono (2010), mengemukakan bahwa fokus merujuk pada satu domain budaya atau beberapa domain yang saling terkait. Penelitian ini berfokus pada analisis koordinasi dalam proses penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung. Kajian ini akan melihat sejauh mana Dinas Sosial, Satpol PP, LKS, dan masyarakat dapat bekerja sama secara efektif dalam menjalankan kebijakan ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi sebagai penghambat dalam pelaksanaan koordinasi, serta menilai bagaimana kebijakan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi, menurut Handayaniingrat dalam Noviana (2017) menekankan bahwa koordinasi dapat diukur melalui lima indikator:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam koordinasi yang efektif. Dalam konteks ini, komunikasi mencakup komunikasi antara Dinas Sosial, Satpol PP dan LKS, keberadaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif. Informasi yang dibagikan oleh Satpol PP, dan Dinsos harus mencakup data tentang lokasi gelandangan pengemis, jumlah, kondisi, dan informasi yang diberikan oleh LKS harus mencakup kebutuhan gelandangan pengemis. Alur informasi yang baik memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi yang diperlukan, menghindari miskomunikasi, dan mempercepat proses koordinasi.

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran tentang pentingnya koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS menentukan bagaimana setiap pihak memahami perannya dan tanggung jawabnya dalam upaya bersama. Pengetahuan ini melibatkan pemahaman terhadap apa saja prosedur, tujuan, dan manfaat yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Satpol PP dan LKS. Serta mengetahui tingkat keselarasan antara tujuan, strategi, dan tindakan dari berbagai pihak yang terlibat.

3) Kompetensi Partisipan

Kompetensi dari individu yang terlibat dalam proses koordinasi sangat mempengaruhi efektivitasnya. Kompetensi ini mencakup kepala bidang di Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS yang berwenang perlu terlibat dan memahami proses koordinasi untuk memastikan bahwa keputusan dan langkah yang diambil memiliki dukungan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan. Staff dan jajaran yang bekerja pada masing-masing tupoksi di tiap organisasi harus memiliki kemampuan dan menguasai kegiatan koordinasi, guna meningkatkan efektivitas kinerja.

4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Faktor ini mencakup komitmen, kesepakatan, dan insentif antara Dinas Sosial, Satpol PP dan LKS dapat mempengaruhi koordinasi, adanya kesepakatan yang jelas antara Dinas Sosial, Satpol PP dan LKS yang terlibat mengenai tujuan, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diambil. Kesepakatan ini memastikan bahwa Dinas Sosial, Satpol PP dan LKS memiliki pemahaman yang sama. Keberadaan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban mereka dapat meningkatkan komitmen dan disiplin dalam koordinasi. Insentif dapat memotivasi partisipasi aktif dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat. Insentif bisa berupa penghargaan atau keuntungan lain yang didapat ketika tugas dan tanggung jawab dalam koordinasi dipenuhi dengan baik.

5) Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas dalam perencanaan menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS dalam melakukan penanggulangan gelandangan pengemis seharusnya bukanlah aktivitas satu kali, tetapi proses berkelanjutan. Dinas Sosial dapat memberikan dan menerima umpan balik secara berkelanjutan sangat penting untuk menilai efektivitas koordinasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Evaluasi yang dilakukan secara rutin merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas koordinasi antarinstansi. Melalui evaluasi berkala, instansi terkait dapat menilai sejauh mana mekanisme koordinasi yang telah diterapkan masih relevan dan mampu merespons dinamika sosial yang terus berkembang, khususnya dalam penanggulangan gelandangan pengemis. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan program, tetapi juga sebagai sarana refleksi untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, serta kebutuhan baru yang muncul di lapangan.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Dinas Sosial berperan sebagai sumber informasi atau *leading sector* yang dapat mengungkap serta menggambarkan fenomena yang terjadi, sekaligus menyediakan informasi yang diperlukan untuk tempat atau wilayah di mana peneliti melaksanakan penelitian menjawab permasalahan penelitian mengenai koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian mencakup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satpol PP Kota Bandar Lampung, serta Lembaga Kesejahteraan sosial yang saling berkoordinasi.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui berbagai teknik, seperti wawancara dan dokumentasi. Dalam studi yang berfokus pada penerapan koordinasi dalam menangani permasalahan gelandangan pengemis, data ini menjadi sumber utama dalam menganalisis dinamika serta efektivitas koordinasi yang dilakukan, data primer mencakup informasi yang dikumpulkan langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau memiliki pemahaman mendalam terkait permasalahan tersebut. Melalui wawancara dengan informan dan

dokumentasi, peneliti dapat memahami bagaimana koordinasi diterapkan, tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, serta dampaknya terhadap efektivitas penanggulangan gempa di wilayah yang dikaji.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber yang telah ada, seperti dokumen resmi, laporan kebijakan, data statistik, rekaman pertemuan, atau literatur terkait. Dalam konteks koordinasi dalam penanggulangan gelombang pengemis, data sekunder yang dikumpulkan dapat mencakup kebijakan pemerintah, laporan program penanggulangan, hasil penelitian terdahulu, serta data dari instansi terkait. Data sekunder berperan penting dalam memberikan gambaran lebih luas mengenai konteks penelitian, membantu membandingkan hasil wawancara dengan kebijakan yang telah ada, serta memperkaya analisis dengan perspektif yang lebih komprehensif (Sugiyono, 2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Herdiansyah (2019), menjelaskan bahwa wawancara dapat dilakukan dalam bentuk terstruktur, semi-terstruktur, atau bebas. Metode ini memberikan keunggulan bagi peneliti dalam menggali informasi secara mendalam serta memperoleh perspektif yang lebih personal dan komprehensif. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pejabat Dinas Sosial, petugas Satpol PP, LSM, serta gelandangan pengemis yang menjadi subjek kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja (non-probabilitas) dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses koordinasi penanggulangan gelombang pengemis di Kota Bandar Lampung.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan kontekstual dari pihak-pihak yang benar-benar memahami dinamika dan hambatan koordinasi antarinstansi. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini mencakup perwakilan dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Apik Mandiri, yang secara struktural dan operasional terlibat dalam upaya penanganan gepeng.

Tabel 4. Data Informan Informasi Penelitian

No.	Informan	Institusi	Fokus Penelitian
1.	Sriyani, S.Pd	Kepala Bidang bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Tentang proses koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.
2.	Suheri, S.Sos., M.M	JF Penyuluh Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Tentang proses koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung.
3.	Carl Arlyn Akbar, S.STP., M.A.P	Kasi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja	Tentang proses koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung
4.	Siti Habibah, S.pd	Sekretaris Lembaga Kesejahteraan Sosial Apik Mandiri	Tentang proses koordinasi dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung

Sumber : Diolah peneliti 2025

2. Dokumen

Menurut Mardawani (2020), dokumen dalam penelitian merupakan Salah satu teknik utama dalam memperoleh data adalah melalui pengkajian dokumen. Pendekatan ini melibatkan proses pengumpulan, pengamatan, dan analisis terhadap berbagai materi tertulis yang relevan dengan fokus atau objek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan, rekaman, catatan, kebijakan, surat-menyurat, laporan evaluasi kebijakan, serta data statistik jumlah gelandangan pengemis sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. serta dokumen lain yang relevan dengan pembahasan

yang diteliti. Dokumentasi ini membantu mengidentifikasi sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Tabel 5. Gambaran dan Dokumen Penelitian

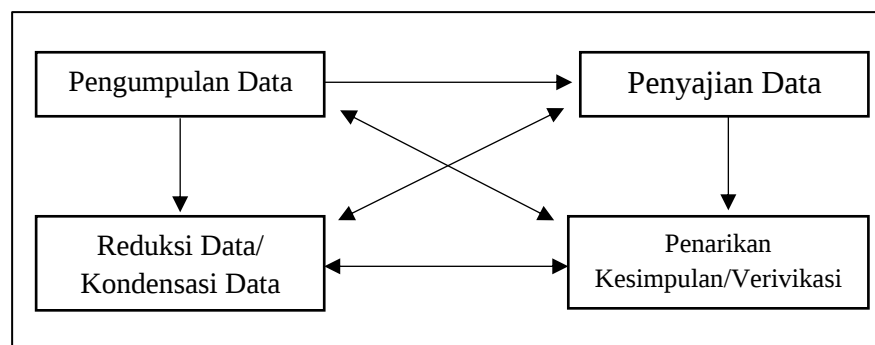
No.	Nama Dokumen
1.	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis
2.	Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2021 Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
3.	Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
4.	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
5.	Rencana Strategis Sekretaris Daerah 2021-2026
6.	Raperwal RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2025

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

3.6 Teknik Analisis Data

Tahap analisis data memegang peran krusial dalam penelitian kualitatif, di mana informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, dan dokumen, disusun secara terstruktur (Sugiyono, 2018). Miles et al., (2014) menyatakan bahwa metode yang digunakan bersifat interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga seluruh data dapat diinterpretasikan secara komprehensif. Analisis ini melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengelola dan menyusun data agar lebih mudah dipahami oleh pihak terkait maupun peneliti lain yang berkepentingan.

Gambar 2. komponen dalam analisis data Kualitatif



Sumber : (Miles et al., 2014

1. Pengumpulan Data

Langkah pertama dalam penelitian adalah menghimpun informasi dari berbagai sumber, seperti wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul masih dalam bentuk awal dan memerlukan proses analisis lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sebagai contoh data dikumpulkan berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

2. Reduksi Data

Data dari wawancara, dan dokumentasi akan disaring oleh peneliti agar relevan dengan implementasi kebijakan penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan peran stakeholder, seperti pemerintah daerah seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS. Sebagai contoh pernyataan informan yang tidak terkait langsung dengan proses koordinasi tidak dimasukkan dalam analisis lanjutan.

3. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi, data diorganisir dalam bentuk yang lebih sistematis, seperti narasi, tabel, atau grafik, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian ini memudahkan peneliti dalam menganalisis serta menarik kesimpulan yang lebih jelas dan terarah. Kategori data yang digunakan mencakup mekanisme implementasi kebijakan, koordinasi antar stakeholder, tantangan yang dihadapi, serta dampak kebijakan bagi

gelandangan pengemis. Sebagai contoh hasil wawancara dari tiga instansi utama (Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS) disajikan dalam bentuk uraian tematik sesuai dengan aspek koordinasi, hambatan, dan pelibatan peran.

4. Penarikan Kesimpulan

Peneliti berupaya memahami makna dari data yang telah dianalisis dan merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan pola temuan di lapangan, memperhatikan sejauh mana koordinasi telah diimplementasikan, hambatan yang terjadi, serta tingkat efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan. Temuan tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Sebagai contoh temuan tentang lemahnya komunikasi antarinstansi diperkuat dengan data wawancara dan dokumen yang menunjukkan tidak adanya MoU atau jadwal koordinasi rutin.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Validitas data merupakan aspek penting dalam proses penelitian, karena bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan variabel yang dikaji. Dalam pendekatan kualitatif, pengujian validitas dilakukan melalui berbagai teknik, salah satunya adalah triangulasi, guna menjamin akurasi dan keterandalan data. Tahapan ini sangat penting agar peneliti mampu memberikan interpretasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan atas temuan yang dihasilkan.

Validasi data menjadi tahap penting dalam penelitian kualitatif guna menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan variabel yang dikaji. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memastikan keakuratan data adalah teknik triangulasi. Miles *et al.* (2014) menjelaskan bahwa triangulasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Uji *Kredibility*

Kredibilitas merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menjamin validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks

penelitian ini, upaya untuk mencapai kredibilitas dilakukan melalui penerapan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri adalah strategi yang digunakan untuk memverifikasi keandalan data dengan melibatkan sumber atau informasi lain di luar data utama, yang berfungsi sebagai pembanding guna memperoleh hasil yang lebih tepat dan terpercaya. Sebagai contoh pernyataan dari pihak Satpol PP mengenai kendala koordinasi dibandingkan dengan keterangan dari Dinas Sosial dan LKS, serta dokumen kegiatan yang tersedia. Adapun jenis triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan salah satu metode triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data untuk menguji kredibilitas informasi. Teknik ini membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti wawancara, dan dokumentasi, guna memastikan keakuratan serta konsistensi data.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode yang digunakan untuk memastikan keakuratan data dengan cara membandingkan informasi yang berasal dari sumber yang sama, namun diperoleh melalui pendekatan yang berbeda. Sebagai ilustrasi, data yang dikumpulkan melalui wawancara dapat divalidasi kembali melalui telaah dokumen. Pendekatan ini berfungsi untuk memperkuat kredibilitas dan validitas temuan dalam penelitian.

2. Uji *Transferability*

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, *transferability* merujuk pada validitas eksternal, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau relevan di konteks lain. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti berupaya menyusun laporan secara mendetail, terstruktur, jelas, dan dapat dipercaya, agar pembaca dapat memahami temuan penelitian dengan baik. Penyampaian hasil secara rinci ini bertujuan agar pihak lain dapat mengevaluasi apakah temuan tersebut sesuai dan dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Jika pembaca mampu menangkap gambaran secara

menyeluruh mengenai kemungkinan penerapan hasil penelitian di lingkungan lain, maka laporan ini telah memenuhi kriteria *transferability*. Contoh peneliti menjelaskan secara detail struktur organisasi, wilayah kerja, dan sistem koordinasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *dependability* dilakukan melalui proses audit terhadap keseluruhan tahapan penelitian. Audit ini dapat dilakukan oleh pihak yang bersifat independen ataupun oleh dosen pembimbing. Tujuan utama dari audit ini adalah meninjau secara menyeluruh seluruh aktivitas peneliti selama proses penelitian berlangsung. Dengan cara ini, keandalan dan validitas dari setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri dan dikonfirmasi. Proses ini memastikan bahwa teknik yang diterapkan, data yang diperoleh, serta langkah-langkah analisis yang dilakukan telah mengikuti kaidah dan prosedur penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh peneliti memasukkan pertanyaan dan hasil wawancara dan dokumen yang digunakan untuk mendukung proses analisis.

4. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *confirmability* merujuk pada uji objektivitas hasil penelitian. Sebuah penelitian dinilai objektif apabila hasil yang diperoleh dapat diterima dan disetujui oleh banyak pihak. Uji *confirmability* memiliki kemiripan dengan uji *dependability*, sehingga keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam pengujian *confirmability*, hasil penelitian dievaluasi dengan menelusuri keterkaitannya terhadap keseluruhan proses penelitian yang telah dijalankan. Apabila temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil dari proses yang dilakukan secara sistematis, maka penelitian tersebut telah memenuhi kriteria *confirmability*. Sebagai contoh peneliti melampirkan kutipan asli dari informan dan memverifikasi kembali hasil wawancara dengan narasumber sebelum ditulis dalam skripsi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Koordinasi dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), telah terbentuk namun belum berjalan secara optimal. Berikut adalah uraian kesimpulan berdasarkan indikator yang digunakan:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi fondasi awal dalam membentuk keselarasan informasi, pemahaman peran, serta kejelasan tindakan antar aktor. Komunikasi masih bersifat satu arah, cenderung formal, dan minim interaksi timbal balik. Tidak adanya forum komunikasi rutin dan mekanisme umpan balik antarpihak yang menyebabkan miskomunikasi, informasi mendadak, serta respons lapangan yang tidak sinkron.

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran mendorong partisipasi aktif dan keterbukaan antar lembaga dalam proses koordinasi. Kesadaran sudah ada di tingkat pimpinan, namun belum merata pada tingkat pelaksana teknis. Sebab minimnya refleksi bersama, pembinaan, dan internalisasi nilai koordinatif. Dampaknya koordinasi bersifat formalitas, dan hanya aktif saat ada tekanan eksternal.

3. Kompetensi Partisipan

Kompetensi menentukan kapasitas SDM untuk melaksanakan koordinasi secara profesional dan responsif, SDM dari beberapa instansi belum dilengkapi pelatihan koordinatif atau pemahaman lintas sectoral, serta terbatasnya pelatihan bersama dan tidak adanya standarisasi peran antar

actor, sehingga pelaksana seringkali tidak siap dan bekerja secara reaktif, bukan strategis.

4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif

Kesepakatan formal menjadi landasan kerja sama agar terhindar dari multitafsir dalam pelaksanaan, namun tidak terdapat dokumen MoU, rencana aksi bersama, atau SOP lintas sector, sebab Koordinasi belum dipayungi oleh kerangka hukum operasional bersama. Komitmen menjaga keberlangsungan kerja sama, sementara insentif memberi motivasi tambahan bagi aktor yang terlibat. Tidak adanya mekanisme reward atau pengakuan kinerja atas keberhasilan koordinasi, sehingga partisipasi cenderung tidak konsisten dan menurun ketika tidak ada tekanan administratif

5. Kontinuitas Perencanaan

Keberlanjutan perencanaan memastikan koordinasi tetap adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, perencanaan dilakukan per tahun tanpa mekanisme revisi dinamis atau evaluasi periodik renstra. Tidak adanya sistem monitoring dan pelibatan lintas aktor dalam pembaruan rencana sehingga koordinasi tidak responsif terhadap situasi baru, seperti meningkatnya gepeng pasca migrasi musiman.

5.2 Saran

Berdasarkan isi skripsi berjudul "Koordinasi dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Bandar Lampung", penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut:

1. Peningkatan Intensitas Rapat Koordinasi Tatap Muka

Dinas Sosial, Satpol PP, dan LKS Apik Mandiri perlu memperkuat koordinasi melalui forum pertemuan rutin yang terjadwal dan terdokumentasi secara resmi. Koordinasi tidak hanya dilakukan melalui media informal seperti pesan singkat atau laporan, tetapi perlu diperkuat dengan rapat tatap muka untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi hasil kerja, dan menyusun strategi bersama.

2. Penyusunan SOP Koordinasi Antarinstansi

Perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) koordinasi yang lebih rinci dan disepakati bersama oleh seluruh lembaga terkait. SOP ini dapat memuat mekanisme alur informasi, pembagian peran, serta tindak lanjut penanganan gepeng agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan penguatan Kompetensi Partisipan

Setiap pihak yang terlibat dalam proses koordinasi, baik dari Dinas Sosial, Satpol PP, maupun LKS, perlu dibekali dengan pelatihan teknis dan pemahaman mendalam terkait kebijakan penanganan gepeng. Hal ini penting untuk memastikan setiap aktor memahami peran dan tanggung jawabnya secara profesional dan selaras dengan tujuan bersama.

4. Penguatan Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Berkelanjutan

Dinas Sosial, dan LKS Apik Mandiri perlu terus mengembangkan program pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian, misalnya pelatihan

kewirausahaan, bantuan usaha produktif, dan pendampingan berkelanjutan. Hal ini agar mantan gepeng tidak kembali ke jalan dan mampu bertahan secara ekonomi.

5. Memperbaharui Regulasi

Perlu adanya pembaruan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang lebih komprehensif dalam penanggulangan gelandangan pengemis di Kota Bandar Lampung. Regulasi tersebut sebaiknya memuat pembagian peran yang jelas antar lembaga, mekanisme koordinasi lintas sektor, serta fokus pada aspek pemberdayaan agar solusi yang dihasilkan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. (2023). *Konsep Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Perspektif Tafsir Tematik Kementrian Agama (Kemenag) RI* (Doctoral dissertation, UIN SUSKA RIAU).
- Anita, A., & Nurmasari, N. (2024). *Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru*. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 442-462.
- Arifin, M. (2022). *Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang).
- Arifudin, O. (2021). *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*.
- Assauri, Sofyan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali ... Gramedia Pustaka Utama Arikunto, S., 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI ed. Jakarta
- Bappenas (2023). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs Indonesia*.
- Bapperida Kota Bandar Lampung. (2024). *Geospasial SDGs Kota Bandar Lampung Tahun 2024*. Pemerintah Kota Bandar Lampung. <https://sdgs.bandarlampungkota.go.id/geospasial>
- Bouckaert, Geert, B. Guy Peters, and Koen Verhoest. 2010. *The Coordination of Public Sector Organizations*.
- Cynthia, V., & Yusran, R. (2021). *Evaluasi program desaku menanti dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Padang*. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 39-46.
- Dewantoro, A., Stiawati, T., & Nugroho, K. S. (2019). *Implementasi Strategi Dinas Sosial dalam Menangani Pengemis di Kota Tangerang* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

- ESG Indonesia. (2024, 12 November.). *17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)*. sumber <https://esgindonesia.com/literasi/17-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs>
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 1(1), 41-49.
- Gittell, J. H., Godfrey, M., & Thistlethwaite, J. (2021). *Interprofessional collaborative practice and relational coordination: Improving healthcare through relationships*. *Journal of Interprofessional Care*, 35(1), 3–5.
- Green Network Indonesia. (2024, Mei 24). Mendorong Perlindungan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. <https://greennetwork.id/ikhtisar/mendorong-perlindungan-dan-pemberdayaan-gelandangan-dan-pengemis/>
- Hadi, A. R. (2021). *Koordinasi Pemerintah Antara Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dan Pemakaman Umum Dalam Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Handayaniingrat, Soewarno (1985), Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen, Cetakan Keenam, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.
- Haris, A. T. C. (2020). *Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan - Andi Tendri Citra Haris -*. leuhkaprio.
- Hasan, M. (2019). *Warisan Pekerjaan Orang Tua (Studi Deskriptif Tindakan Sosial Anak Pengemis Mengikuti Pekerjaan Orang Tuanya Mengemis di Kota Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Hasibuan, M. S. P., (2006), Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Helsandi, F. A., & Marlina, N. (2025). Analisis Koordinasi Pemerintah Kota Tegal Dalam Penanganan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 560-572.

- HS, Y. T., & Kristian, I. (2021). *Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69-81.
- Jasni, M. A., Hassan, N., Ibrahim, F., & Kamaluddin, M. R. (2022). *Gelandangan Bekas Banduan: Suatu Perbincangan Tentang Faktor dan Kesan Bergelandangan Serta Langkah Intervensi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(8), e001679-e001679.
- Judijanto, L., Hildawati, H., Syarweny, N., Ishak, R. P., Heirunissa, H., Lisbet, Z. T., ... & Sugiyarti, G. (2024). *Asas-Asas Manajemen: Konsep, Prinsip, dan Model Manajemen secara Universal dalam Mengelola Organisasi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Julia, M., & Masyrurroh, A. J. (2022). *Literature Review Determinasi Struktur Organisasi: Teknologi, Lingkungan Dan Strategi Organisasi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 383-395.
- Junita, A. J., & Ruja, I. N. (2024). Strategi Bertahan Hidup Keluarga Pemulung di Wilayah Muharto DAS Brantas Kedungkandang Kota Malang. *Sosearch: Social Science Educational Research*, 5(1), 30-39.
- Kencana, U., Yuswalina, Y., & Triyandhy, E. (2021). *Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi COVID-19. Simbur Cahaya*, 27(2), 70-97.
- Kompasiana. (2023). *Teori Collaborative Governance: Kolaborasi dalam Membangun Keseimbangan*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/muhamadqli/64bcda82a0688f6faf3c4562/teori-collaborative-governance-kolaborasi-dalam-membangun-keseimbangan>
- KUSUMA, T. M. D. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Penanganan Tuna Sosial Guna Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kota Bandar Lampung*.
- Lampungfolk. (2025, Januari 17). *Tiap hari Jumat langsung rame "manusia gerobak" Instagram*.
- Madureh.com. (2023). *Ke mana harus pergi jika ingin mengenal lebih dekat desa pengemis di Madura?*. Sumber [Ke Mana Harus Pergi Jika Ingin Menenal Lebih Dekat Desa Pengemis di Madura? - Madureh.com](#)
- Martius, S., *Koordinasi Dan Pelaksanaan Organisasi. Pengantar Ilmu Manajemen*, 2022

- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (3rd ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Nugroho, S. A. (2023). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pengemis Dan Gelandangan* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- O'Toole, L. J., & Meier, K. J. (2004). "Public Management: Organizations, Governance, and Reform." *Public Administration Review*, 64(6), 738-754.
- Prabandary, Novita. W. (2017). Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(6), 570-581.
- RMOL Lampung. (2024, 11 November). *Enam prioritas pembangunan Bandar Lampung 2025*. sumber <https://www.rmollampung.id/enam-prioritas-pembangunan-bandar-lampung-2025>
- Rustamana, A., Rohmah, N., Natasya, P. F., & Raihan, R. (2024). *Konsep Proposal Penelitian dengan Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif*. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(5), 71-80.
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., Lukman, J. P., & Rajab, M. (2023). *Strategi Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Upaya Penanganan Anak Jalanan*. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 19-26.
- Santoso, B. I., Yulyana, E., & Aryani, L. (2022). *Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Menangani Permasalahan Tuna Sosial Di Kota Bekasi (Studi Pada Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Anak Jalanan)*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 213-223.
- Setiawan, H. H. (2020). *Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia*. *Sosio Informa*, 5(3).
- Silalahi, U., & Mifka, S. A. (2015). *Asas-asas manajemen*.
- Sridianti. (n.d.). *Perbedaan Antara Koordinasi Dan Kerjasama*. Retrieved from <https://www.sridianti.com/blog/perbedaan-antara-koordinasi-dan-kerjasama/>
- Sulistyawati, N. P. Y. (2019, December). Upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis. In *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali* (pp. 532-540). Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

- Tantyo Nandi, P. U. R. W. O. K. O. (2023). *Implementasi Program Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung*.
- Trisnawati, L., Syamsuadi, A., Hartati, S., & Reskiyanti, I. (2021). Koordinasi pemerintah dan swasta dalam program corporate social responsibility (csr) school improvement di Kabupaten Pelalawan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(2), 115-123.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*.
- Wijayanto, H. D. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Yan, A. A. (2021). *Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung*.
- Yudianto, E., & Apriliansah, F. (2023). *Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1).
- Yuniar, D. M. (2022). *Collaborative Governance Untuk Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Dinas Sosial Kota Bandung* (Doctoral Dissertation, Fisip Unpas).

Dokumen Penunjang

- Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024
- Peraturan Walikota Bandar Lampung No 45 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
- Rencana Strategis Sekretaris Daerah 2021-2026
- Raperwal RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2025